

KONSTRUKSI HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN pasca UU Cipta Kerja Edisi Revisi

Disahkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UU AP), mengatur penyelenggaraan pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintah. Di Sisi lain warga masyarakat mendapat perlindungan hukum dengan aturan yang sudah jelas.

Dinamika perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa dengan diadopsinya *omnibuslaw* dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan UU Cipta Kerja merubah ketentuan yang diatur di UU Administrasi Pemerintahan, terkait diskresi, keputusan elektronik, dan fiktif positif.

Akibat hukum dengan perubahan UU Cipta Kerja, merubah konsep diskresi, dan penghapusan syarat bagi pejabat pemerintah dalam penggunaan diskresi wajib mematuhi ketentuan dalam dalam peraturan perundang-undangan dihapus, dan putusan fiktif positif yang menghapus kewenangan PTUN, serta keputusan elektronik.

Perkembangan pengaturan dalam UU Administrasi Pemerintahan, yang dirubah dalam UU Cipta, menjadi buku Konstruksi Hukum Administrasi Pemerintahan: Membedah UU NO.30 Tahun 2014, harus mengikuti dengan edisi revisi. Judul buku di atas, dirubah menjadi Konstruksi Hukum Administrasi Pemerintah, Pasca Terbitnya UU Cipta (Edisi Revisi).

Sejatinya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberi dampak yang luar biasa, dalam penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini, baik positif dan negatif bagi warga masyarakat dan badan/atau pejabat pemerintahan dalam melakukan putusan dan/atau tindakan.

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy



KONSTRUKSI HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasca UU Cipta Kerja

Edisi Revisi



CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Konstruksi Hukum Administrasi Pemerintahan Pasca UU Cipta Kerja

**KONSTRUKSI HUKUM
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PASCA UU CIPTA KERJA
(Edisi Revisi)**

Penulis :

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Editor :

Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy

2023

**KONSTRUKSI HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PASCA UU CIPTA KERJA (Edisi Revisi)**

Copyright © CV. Muhammad Fahmi Al Azizy 2023

Hak cipta ada pada penulis

viii + 152 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-8127-04-7

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Penyunting : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Produksi : Lingkar Media Jogja

Diterbitkan tahun 2023 oleh:

CV. Muhammad Fahmi Al Azizy

Bandung Rt. 30 No. 163, Pendowoharjo, Sewon, Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta

Tlp. 085725782088

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta



2023

KATA PENGANTAR

Disahkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UU AP), mengatur penyelenggaraan pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintah. Di Sisi lain warga masyarakat mendapat perlindungan hukum dengan aturan yang sudah jelas.

Dinamika perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa dengan diadopsinya *omnibuslaw* dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan UU Cipta Kerja merubah ketentuan yang diatur di UU Administrasi Pemerintahan, terkait diskresi, keputusan elektronik, dan fiktif positif.

Akibat hukum dengan perubahan UU Cipta Kerja, merubah konsep diskresi, dan penghapusan syarat bagi pejabat pemerintah dalam penggunaan diskresi wajib mematuhi ketentuan dalam dalam peraturan perundang-undangan dihapus, dan putusan fiktif positif yang menghapus kewenangan PTUN, serta keputusan elektronik.

Perkembangan pengaturan dalam UU Administrasi Pemerintah, yang dirubah dalam UU Cipta, menjadi buku Konstruksi Hukum Administrasi Pemerintahan: Membedah UU NO.30 Tahun 2014, harus mengikuti dengan edisi revisi. Judul buku di atas, dirubah menjadi Kontruksi Hukum Administrasi Pemerintah, Pasca Terbitnya UU Cipta (Edisi Revisi).

Sejatinya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberi dampak yang luar biasa, dalam penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini, baik positif dan negatif bagi warga masyarakat dan badan/atau pejabat pemerintahan dalam melakukan putusan dan/atau tindakan.

Keberlakuan UU Administrasi Pemerintahan, seiring berjalannya muncul permasalahan-permasalahan pada penerapannya, berkaitan dengan pengadilan. Ketidaksinkronan muatan UU AP dan UU PTUN dan undang-undang lain, memberi implikasi hukum dalam implementasi, bahkan pasca UU Cipta Kerja disahkan. Upaya hukum dan solusi dilakukan oleh MA untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Buku ini memberi pandangan baru terhadap administrasi pemerintahan yang selama ini berjalan, dengan standar yang jelas, akuntabel, dan transparan. Buku ini rangkaian dari buku sebelumnya, Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, Pasca UU Cipta Kerja yang lebih menekankan pada diskresinya pada UU AP.

Saya menyadari buku ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan itu milik Allah SWT. Sebagai akademisi ini bentuk sumbangsih terhadap keilmuan, dan mewarnai literasi di bidang ilmu hukum. Pada hakekitnya menulis itu adalah hobby yang menjadi fashion saya, setiap membaca, mengikuti berita, menorrhakan tulisan sekata, dua kata, selembat, dua lembar, dan

seterusnya untuk membuat kesenangan belaka, namun itu menjadi nyaman dan indah bagi baginya menjadi karya yang dipublikasikan.

Sejatinya menulis itu kewajiban dan tanggung jawab moral saya sebagai dosen. Terimakasih Ya Allah atas semua keilmuan dan keahlian saya menulis yang dilakukan sebuah proses panjang dari artikel, proceeding, jurnal, poster, makalah, buku diktat, modul, buku capter, dan buku ajar, dan buku referensi.

Buku ini menjadi momentum atas semua impian saya, yang tidak pernah terbayang menjadi penulis buku ilmu hukum. Buku ini menjadi buku yang 50 (lima puluh) ilmu hukum yang saya tulis yang akan dipublikan tercatat di perpustakaan nasional. Alhamdulillah puji syukur atas segala rahmatMU ya Allah. Semua karenaMU. Bahagia, senang, haru dan menagis, kok bisa pada titik ini. Ini bukan karya terakhir, ini awal untuk menjadi penulis yang professional, dan fokus di bidang ilmu hukum, untuk memperkaya literasi di Propinsi Kalimantan Timur, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Buku adalah karya yang abdi, yang akan selalu diingat. Wujud kita berbicara pada zaman kelak, dan amal jariah bagi penulis, dapat memberi manfaat bagi pembacaranya. Kita tidak meninggalkan harta dan segalanya, namun buku itu akan abadi. Ilmu saya tanam, semoga apa yang saya tanam, tumbuh subur dan bermanfaat amin.

Terima kasih kepada bapak dan ibu (Alamarhum) yang meninggal secara bergantian di tahun ini, cobaan yang begitu besar, dan hanya pasrah, ikhlas kepadaMU ya Allah Jaga selalu Mereka amin. Buat Suami Evans Sofanus terimakasih atas pertemanan, persahabatan, suka duka, tangis, Bahagia, tetap selalu memberi motivasi dan jadi Iman. Terimakasih atas waktu, share, semangat untuk saya terus berkarya, dan kritiknya. Hal paling indah atas perjalanan hidup yang kita jalani, dan menikmati atas kuasa Tuhan yang diberikan pada keluarga kita. Buat editor, penerbit yang membantu penyelesaian buku ini. Harapan ini semoga bermanfaat.

Samarinda, 5 Oktober 2022

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Filosofi Administrasi Pemerintahan	3
1.3 Jaminan Perlindungan Hukum Kepada Warga Masyarakat.....	10
1.4 Transformasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	11
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMERINTAHAN	18
2.1 Kedudukan Hukum Pejabat Pemerintahan	18
2.2 Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan	20
2.3 Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan	26
2.4 Wewenang dan Kewenangan Pemerintah	30
BAB III KEWENANGAN PENGGUNAAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN	42
3.1 Definisi Kewenangan Penggunaan Diskresi	42
3.2 Kewenangan Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan	48
3.3 Batasan Kewenangan Penggunaan Diskresi	53
3.4 Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah Pasca UU Cipta Kerja	58
BAB IV PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	62
4.1 Pengertian Dasar Penyelenggara Pemerintahan dan Penyelenggara Negara	62
4.2 Keputusan Berbentuk Elektronik Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja	67
4.3 Prosedur Administrasi Pemerintahan	75
4.4 Pelayanan Publik Untuk Warga Masyarakat	83
BAB V KEPUTUSAN PEMERINTAHAN	86
5.1 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara	86
5.2. Dalil Fiktif Positif dan Fiktif Negatif.....	92
5.3 Penerapan Fiktif Positif Pasca UU Cipta Kerja	

5.4. <i>Ontvangs theory</i>	111
5.5 Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Pemerintah.....	116
5.6 Perkembangan Kaidah Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Fiktif positif.....	122
BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF	125
6.1 Penegakan Hukum Administrasi	125
6.2 Upaya Administrasi	129
6.3 Sanksi administratif.....	131
DAFTAR PUSTAKA	140
GLOSARIUM	143
INDEKS	147
BIODATA PENULIS	151